
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN BENGKALIS

Oleh:

Billy Yanis Saputra,

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis

Email: api87berkobar@gmail.com

Firdaus,

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis

Email: firdsfirdaus@gmail.com

Imam Fakhruddin,

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis

Email: Imamfakhruddin0@gmail.com

Riki Rianto,

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis

Email: rikhyriantho@gmail.com

Putri Neli Pratiwi,

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis

Email: nelipratiwi@gmail.com

Nurhayati,

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis

Email: nurhayatibks11@gmail.com

.Article Info

Article History :

Received 16 July - 2022

Accepted 25 July - 2022

Available Online

31 July - 2022

Abstract

For more than two years, Bengkalis Regency has become an autonomous region, but it has not been able to independently from the financial aspect to run the wheels of government. Characterized by the small contribution of PAD to APBD and still high dependence on the Balance Fund from the central government. This research aims to find out how the effect of balance funds and local native income on the capital expenditure of Bengkalis Regency. The population in this study is the Budget Realization Report (LRA) of Bengkalis Regency in 2012-2021, the sampling technique used is census. Data is processed by multiple linear regression. The results showed that the balance fund had no effect on capital expenditures. This is due to the lack of optimal use of regional budgets, where the amount of silpa funds every year. This silpa fund, shows the weakness of the Local Government in the absorption of budgets for activities that support the economic improvement of the community so that the large funds cannot be realized in the form of capital expenditure optimally. The original income of the region has a negative but insignificant effect on capital expenditure. This is due to the low realization of PAD so as to reduce capital expenditure. Where PAD as one of the sources of regional revenue will determine the size/small capital expenditure.

Keyword :

Balance Fund; Regional

Original Income; Capital

Expenditure

1. PENDAHULUAN

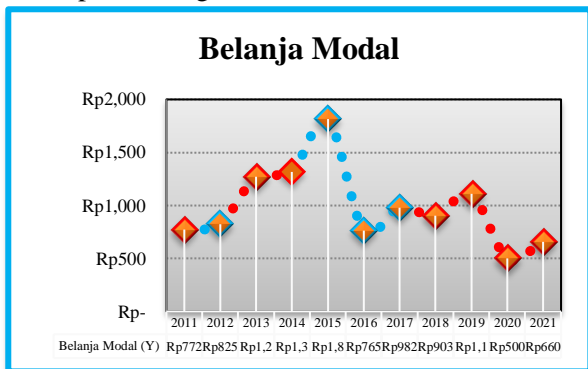
Otonomi daerah menuntut kemandirian yang tinggi dalam segala aspek untuk melaksanakan pemerintahan di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi daerah dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat. Otonomi daerah ini akan mampu

memicu percepatan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penerapan otonomi daerah ini akan meningkatkan tanggungjawab daerah itu sendiri terutama dalam hal finansial. Penggalan potensi daerah perlu dijadikan prioritas guna memaksimalkan sumber-sumber keuangan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut

kemandirian yang tinggi dalam pengelolaan anggarannya.

Penganggaran adalah *managerial plan for action* agar tercapai tujuan pemerintah daerah. Anggaran ini dijadikan dasar penggunaan dana dalam menjalankan pemerintahan. Di Indonesia sendiri, dokumen anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota (Endang Maya Lestari Siregar, 2019).

Kabupaten Bengkalis telah menyanggah predikat daerah otonom lebih dari dua dekade lalu. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah harus mampu memaksimalkan pendapatan daerah dan mengelola belanja daerah secara efisien. Belanja modal merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh sejumlah *asset* yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal ini direalisasikan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum yang menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat (Diah Nurdiwaty, 2017). Jadi pemerintah daerah sendiri harus mampu membelanjakan belanja modal tersebut dengan baik. Berikut adalah realisasi belanja modal Kabupaten Bengkalis:



Gambar 1. Pergerakan Belanja Modal
Sumber: Diolah Penulis (2022)

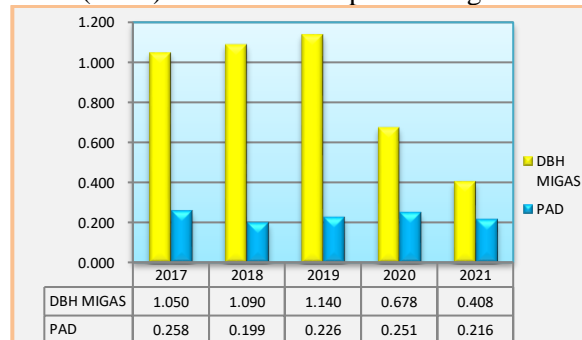
Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa belanja modal Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2011-2021 bergerak secara fluktuatif. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan infrastruktur serta juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Jumlah belanja modal yang dialokasikan ini dapat dipengaruhi oleh besar/kecilnya dana perimbangan yang transfer oleh pemerintah pusat (Wike Nurliza Arpani dan Halmawati, 2020). Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan yang dijadikan sebagai panduan dalam pembagian pendapatan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama dari dana perimbangan ini adalah

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dana perimbangan adalah dana yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk seluruh daerah guna membiayai keperluan daerah untuk mengimplementasikan desentralisasi dan otonomi daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain itu, Belanja modal ini juga tidak terlepas dari besar kecilnya PAD yang mampu direalisasikan (Riko Novianto dan Hanafiah Rafiudin, 2015). PAD merupakan pendapatan daerah yang diterima sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) yang telah ditetapkan. Sumber-sumber PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan lain-lain pendapatan. Kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Kemampuan daerah yang sebenarnya tercermin dalam pendapatan asli daerah. Kabupaten Bengkalis belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tolak ukur kemampuan keuangan daerah.

Kabupaten Bengkalis masih sangat tergantung dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sebagian besar APBD tersebut masih ditopang oleh DBH migas dimana kontribusi PAD masih sangat minim. Berikut ini adalah perbandingan Dana Bagi Hasil (DBH) dan PAD Kabupaten Bengkalis:



Gambar 2. Perbandingan Jumlah DBH Migas dan PAD

Sumber: Diolah Penulis (2022)

Rendahnya PAD ini akan berdampak terhadap besar kecilnya belanja modal yang akan digunakan daerah untuk menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masih rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah secara mandiri.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Anggoro, 2017:18). Subeken (2012) menyatakan bahwa tujuan dari penyaluran dana perimbangan oleh pemerintah pusat antara lain sebagai berikut:

1. Membantu daerah dalam membiayai kewenangannya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayan kepada masyarakat
2. Mengurangi *gap* antar pendanaan pemerintah pusat dan daerah
3. Mengurangi *gap* antar satu daerah dengan daerah lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan dapat dirincikan, yaitu dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan proses pelayanan kepada masyarakat, serta pemaksimalan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017:18). Sumber-sumber yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut (Anggoro, 2017:18):

1. Pajak Daerah, merupakan pajak-pajak yang telah ditentukan dalam pemungutannya dalam Peraturan Daerah dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah daerah
2. Retribusi Daerah, pembayaran yang dikenakan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2008:101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008:141), belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dimana data yang telah dikumpulkan, dianalisa kemudian dideskripsikan tanpa bermaksud mengeneralisasi (Sugiyono, 2016). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis.

Objek adalah sekumpulan benda atau orang yang dijadikan topik dalam pembahasan tertentu. Objek dapat juga dikatan sebagai sesuatu yang dijadikan pembahasan. Objek penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah variabel yang dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari dana perimbangan, PAD dan belanja modal

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Data *time series* adalah data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari satu tahun pada satu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu/objek. Data *time series* dalam penelitian ini memiliki *series* 10 tahun.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terkait dana perimbangan, PAD dan belanja modal

Kabupaten Bengkalis. Di samping itu data sekunder juga diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa buku panduan, *literature* kepustakaan dan catatan-catatan yang berhubungan dengan dana perimbangan, PAD dan belanja modal Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2021.

Populasi merupakan kelompok atau kumpulan individu-individu/objek penelitian yang memiliki standar-standar dan ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau objek pengamatan yang mempunyai setidaknya satu persamaan karakteristik.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bengkalis.

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil dari populasi yang harus mampu merepresentatif populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkalis periode 2012-2021.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji t
Coefficients^a

| Model | B | Unstandardize | Standardized | T | Sig. |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| | | d Coefficients | | | |
| | | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 11908 07238 760,3 45 | 11901 39709 470,3 44 | | 1,001 | ,346 |
| Dana Perimbangan | -,136 | ,259 | -,186 | -,525 | ,614 |
| PAD | ,811 | 3,276 | ,088 | ,247 | ,811 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Pengolahan Hasil SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.233.339.868.355,053 - 0,120 + 0,508 + e$$

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis Pertama (H₁) yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat:

$$t_{\text{hitung}} = -0,433 > t_{\text{tabel}} = -2,89646$$

maka tolak H₀ (terima H₁)

$$\text{Sig. tabel} = 0,678 < (\alpha) = 0,05$$

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (X₁) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal (Y) sebagai variabel terikat.

Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan asli daerah tidak akan mempengaruhi besar/kecilnya belanja modal daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan rendahnya realisasi dan kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dimana PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah akan menentukan besar/kecil belanja modal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum mampu mengoptimalkan penerimaan daerah melalui PAD sehingga kurang mampu menopang belanja modal Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erpita dan Yani Rizal (2019), Haryanto dan Indra Sulistyanyingsih (2019) menunjukkan bahwa PAD signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan (X₂) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis Kedua (H₂) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat:

$$t_{\text{hitung}} = 0,143 < t_{\text{tabel}} = 2,89646$$

maka tolak H₀ (terima H₁)

$$\text{Sig. tabel} = 0,890 < (\alpha) = 0,05$$

Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan (X₂) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal (Y) sebagai variabel terikat. Hal ini menunjukkan bahwa besar/kecilnya dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini justru mengindikasikan bahwa banyaknya dana yang tidak terserap secara optimal oleh kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya penggunaan

anggaran daerah, dimana banyaknya dana silpa setiap tahunnya. Dana silpa ini, menunjukkan kelemahan Pemerintah Daerah dalam penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi masyarakat sehingga dana yang besar tersebut tidak mampu direalisasikan dalam bentuk belanja modal secara optimal. Untuk itu pemerintah daerah seharusnya membuat “*Master Plan*” yang lebih matang untuk mengoptimalkan pengeluaran untuk sektor-sektor produktif dengan merancang program-program inovatif yang langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Noor Aini Arifah (2019), Priatna Husaeri dan Jaya Purwadinata (2019) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah daerah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan rendahnya realisasi PAD sehingga menurunkan belanja modal. Dimana PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah akan menentukan besar/kecil belanja modal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum mampu mengoptimalkan penerimaan daerah melalui PAD sehingga kurang mampu menopang belanja modal Kabupaten Bengkalis.
2. Dana Perimbangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya penggunaan anggaran daerah. Dapat dilihat banyaknya dana silpa setiap tahunnya yang mengindikasikan lemahnya Pemerintah Daerah dalam penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi masyarakat. Sehingga dana yang besar tersebut tidak mampu direalisasikan dalam bentuk belanja modal secara optimal.

6. REFERENSI

- Arifah, N. A. dan H. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kota Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 08 (02).
- Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Derise. (2009). *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks.
- Diah Nurdiwaty. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17.
- Endang Maya Lestari Siregar. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara*.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Husaeri Priatna, & J. P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 03 (02).
- Indra Sulistyaningsih, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 08(02).
- Riko Novianto dan Hanafiah Rafiudin. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 04 (01).
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wike Nurliza Arpani dan Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Eksplorasi Akuntansi*, 02 (01).
- Yani Rizal dan Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Samudera Ekonomika*, 03 (01).